

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena begitu eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan (Simanjuntak, 2012).

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dari pada basis lainnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi, efisiensi, dan efektivitas. Serta ketaatan terhadap peraturan penerapan basis akrual

dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015. Ini berarti pada tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat akan mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Satuan Kerja pada pemerintah pusat sebagai entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat tentunya memegang peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No 01 bahwa Basis akrual atau dasar akrual (*accrual basis*) adalah “Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar meskipun biaya dan pendapatan tersebut belum benar-benar dibayar atau diterima”. Basis akrual merupakan pilar utama dalam prinsip kesesuaian (*matching principle*), yang merupakan salah satu prinsip akuntansi. Ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis AkruaL. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan demikian pada saat ini merupakan masa persiapan dan peralihan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara. Pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan/PSAP (2010) diungkapkan jangka waktu kewajiban bagi pemerintahan daerah untuk mengimplementasikan PP 71 ini adalah empat tahun setelah peraturan pemerintah ini diterbitkan yaitu pada tahun 2014, akan tetapi ada kemungkinan sebagian besar pemerintahan daerah masih belum siap untuk mengimplementasikan PP 71 tahun 2010 atau akuntansi berbasis akrual penuh. Hal ini diakibatkan oleh Sumber Daya Manusia yang belum memahami betul tentang penerapan akuntansi akrual secara baik dan benar.

Pada saat ini masih ada Pemerintah Pusat yang masih menggunakan Akuntansi Basis Kas Menuju AkruaL atau *Cash Toward AccruaL (CTA)* dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Dengan penyusunan laporan keuangan dengan akuntansi berbasis CTA, pemerintah pusat saat ini sudah dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan Undang-undang, Kementrian/Lembaga juga dapat mengimplementasikan relatif cukup baik dan telah cukup baik menyediakan informasi akrual walaupun secara periodik dan

dengan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem. Namun ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi dengan akuntansi CTA. Hal pertama adalah laporan keuangan berbasis kas menuju akrual belum memperhatikan kinerja pemerintah secara keseluruhan, saat ini hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas (*Financial Assets*). Laporan keuangan juga tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena beban yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran maupun laporan lainnya, hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU 17 Tahun 2003.

Sedangkan Basis Akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Akuntansi berbasis akrual merupakan *International Best Practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management (NPM)* yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Yang dimana mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya/beban. Perbedaan utama antara basis kas menuju akrual dengan basis akrual adalah pada basis akrual pengakuan pendapatan dan biaya. Sebagaimana dijelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan biaya pada basis kas dilakukan berdasarkan masuk dan keluarnya kas, sementara basis akrual

berdasarkan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Sehingga dalam penggunaan basis kas akan lebih banyak menimbulkan kecurangan jika dibandingkan dengan penggunaan basis akrual.

Penerapan akuntansi akrual di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal, seperti yang di sampaikan oleh ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam skalanews.com. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah menuntaskan tujuh masalah signifikan mengenai pengelolaan keuangan negara, karena jika dibiarkan dapat menimbulkan kerugian negara dan implikasi negatif bagi pembangunan. Salah satunya adalah masalah penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, " kata Ketua BPK Harry Azhar Azis pada sidang paripurna DPR dengan agenda "Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2014" di Jakarta, Selasa (2/12).

Harry mengatakan penerapan akrual (metode akuntansi, penerimaan dan pengeluaran di catat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau di bayarkan) di pemerintah daerah masih bermasalah. Temuan lembaga auditor utama negara itu, berdasarkan pemeriksaan 184 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), menemukan kasus-kasus ketidaksiapan Pemda untuk menerapkan sistem akrual karena belum ada landasan hukum yang melindungi sistem tersebut.

Pemda, kata Harry juga tidak menyiapkan pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan akuntansi yang berbasis akrual. Hal itu ditambah dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah untuk

menjalankan sistem akrual itu. Padahal jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21, Tahun 2010, pemerintah wajib menerapkan sistem akrual paling lambat pada 2015. (<http://skalaneews.com/diakses> pada tanggal 15 Maret 2015/pkl.15.33 WIB).

Sementara itu, Ritonga (2010) dalam Halim (2012) mengatakan bahwa untuk mendukung penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual diperlukan kondisi-kondisi yang mendukung, sekaligus menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan, Diantaranya yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan yang mempunyai pengalaman yang cukup dibidang akuntansi.
2. Dukungan dari pemeriksa laporan keuangan, karena perubahan basis akuntansi akan mengubah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Perubahan-perubahan yang terjadi harus melalui pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
3. Harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama, bahkan lebih lama dari masa periode jabatan presiden, gubernur, bupati, walikota, dan anggota DPR/DPRD. (www.medina.co.id). Diakses pada tanggal 31 Januari 2015, jam 15.00 wib.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Tingkat Pendidikan Staf Keuangan dan Pengalaman kerja yang cukup merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Penerapan Akuntansi Akrua di Pemerintah Daerah karena hal ini akan berdampak pada Kualitas Laporan Keuangan. Pengertian Pendidikan Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003 : 16) , menjelaskan bahwa : "Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.

Sedangkan pengertian Staf yaitu individu atau kelompok (terdiri dari para ahli) dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya memberikan saran dan pelayanan. Ridwan dan Inge (2003) mendefinisikan Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan *instrument* yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan staf keuangan merupakan individu atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus dalam suatu bidang keuangan dengan tujuan untuk memberikan sarana dan pelayanan kepada pihak lain.

Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Menurut Nazier, (2009) 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah diisi

oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, juga ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti SAP. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi (Zetra, 2009 dalam Muhammad Indra Yudha Kusuma 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Stamatiadis, et al. (2009) menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan staf akuntansi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Kemudian penelitian oleh Ouda, (2008) yang menunjukkan bahwa ketika mendapat pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, staf organisasi di harapkan untuk lebih menghargai manfaat dan penggunaan teknik akuntansi yang baru dan juga untuk mempromosikan implementasinya dalam organisasi pemerintah. Menurut *Windels dan Christiaens* (2006) dalam Muhammad Indra Yudha Kusuma (2013). tingkat umum pendidikan eksekutif dan staf, berdampak positif pada tingkat adopsi reformasi.

Tingkat Pendidikan Staf Keuangan dalam SKPD masih lemah untuk pelaksanaan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jatim dalam beritajatim.com. Gubernur Jatim Soekarwo meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemprov, untuk lebih berkomitmen meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal tersebut disampaikannya pada saat memberikan pengarahan dalam rapat evaluasi sistem

akuntansi berbasis akrual Provinsi Jatim, di kantor Gubernur Jatim, Selasa (3/3/2015).

Ia mengatakan, komitmen pengelolaan keuangan oleh kepala SKPD sangat penting. Kepala SKPD diminta secara rutin harus memeriksa keuangan yang masuk dan keluar. "Peran leadership 50 persen sangat menentukan kesuksesan organisasi. Jika pemimpin tersebut tidak melakukan perubahan, maka yang terjadi instansi tersebut tidak akan berubah," ungkapnya.

Dalam PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menjelaskan, jika SAP berbasis Kas menuju akrual pendapatan belanja dan pembiayaan akan diakui dan dicatat pada saat kas diterima/dikeluarkan. Sedangkan, dalam SAP berbasis akrual menjelaskan, bahwa pendapatan belanja dan pembiayaan akan diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima/dikeluarkan. Dalam rapatnya Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi menambahkan, pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dimulai pada 1 Januari 2015.

Namun demikian, dia mengaku masih ada permasalahan sistem akuntansi berbasis akrual ini. Staf pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan tidak memiliki latar belakang terutama pendidikan akuntansi atau keuangan daerah. "Harus diakui pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan bukanlah orang akuntansi. Akan tetapi, orang yang memiliki ilmu di bidang Sosial Politik (Sospol) yang dididik dan dilatih untuk menjadi akunting," terangnya.

Permasalahan lain, sistem informasi yang digunakan masih berbasis kas menuju akrual. Kebutuhan data/dokumen untuk dasar pengakuan dan pencatatan yang ada belum sesuai serta banyak pejabat dan staf yang menjalankan tugas rangkap secara fungsional.

"Dalam rapat tadi dijelaskan pemahaman terhadap proses akuntansi dan peningkatan kualitas SDM yang ada di SKPD agar dapat mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, sekaligus mencapai opini BPK RI tahun 2015 yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," pungkasnya. (<http://beritajatim.com/diakses> pada tanggal 24 Maret 2015/pkl.15.00 WIB).

Selain tingkat pendidikan staf keuangan, penerapan akuntansi akrual juga dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan (Manulang, 1984). Pendapat lain mengenai pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu (Trijoko, 1980). Menurut Ranupandojo, (1984) mengemukakan pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

Pengalaman kerja seseorang sangat ditentukan oleh rentan waktu lamanya seseorang menjalani pekerjaan tertentu. Lamanya pekerja tersebut dapat dilihat dari banyaknya tahun, yaitu sejak pertama kali diangkat menjadi karyawan atau

staf pada suatu lapangan kerja tertentu. Satuan kerja dengan pengalaman atau yang terlebih dahulu menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan akan mencapai level pemahaman dan penerapan yang lebih baik dalam adopsi dan implementasi sistem yang baru.

Pengalaman untuk pelaksanaan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual masih kurang. Seperti yang disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekkab Kutai Kartanegara dalam KALTIMPOST.co.id. Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekkab Kutai Kartanegara (Kukar) Didi Ramyadi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi PP 71/2010 dan Permendagri 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Simda Keuangan di Lingkungan Pemkab Kukar. Bimtek digelar di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Senin (2/6).

Bupati Kukar Rita Widyasari dalam sambutan yang dibacakan Asisten III mengatakan, perubahan secara prinsip berjalan dengan baik apabila ditunjang sumber daya manusia yang andal. Ini berarti memahami dan menjalankan substansi perubahan secara baik. Dengan demikian, tujuan dan manfaat perubahan dirasakan dengan cepat dan tepat. Adapun penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah salah satu poin penting dalam prinsip *good governance*. “Seluruh transaksi keuangan harus disajikan lengkap, informatif, mudah dipahami, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun bagi pemerintah itu sendiri, selain itu para pegawai penyusun laporan keuangan harus mempunyai pengalaman yang cukup.” urainya.

Melalui sistem akuntansi berbasis akrual sebagai penyempurnaan sistem akuntansi berbasis kas yang selama ini dilaksanakan, diharapkan mampu mengeliminasi kelemahan yang selama ini terjadi. Menurut *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)* dalam publikasinya yang dikutip oleh Bupati Kukar Rita Widyasari mengatakan, penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap sektor publik, memiliki keuntungan.

Di antaranya menunjukkan pemerintahan yang membiayai kegiatan dan memenuhi kebutuhan kas. Ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan mengelola sumber daya yang dimiliki salah satunya pegawai harus berpengalaman. “Oleh karena itu, kita menginginkan setiap personil keuangan daerah di setiap SKPD memiliki kompetensi andal,” tutur dia.

Saat ini telah dimulai upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia. Juga memperkuat sistem informasi keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah. Didi berharap seluruh peserta bimtek memanfaatkan ilmu yang disampaikan ini dengan optimal. (http://KALTIMPOST.co.id/diakses_pada_tanggal_24_maret/pukul_16.00_WIB).

Sehingga dengan dilaksanakannya penerapan Akuntansi yang Berbasis Akrual di percaya Laporan Keuangan yang dihasilkan akan bersifat relevan dan berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu maka pengertian Laporan Keuangan Menurut Fahmi, (2011:2) merupakan Suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran

kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu perusahaan yang bersifat informatif baik perusahaan tersebut mengalami keuntungan ataupun perusahaan tersebut mengalami kerugian.

Menurut (Ekrem kara, dalam Dianne Natalia Christanti 2011) yaitu ada banyak manfaat menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan telah menjadi lebih jelas, sebanding dan akurat. Akuntansi berbasis akrual belum sepenuhnya diterapkan karena terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam hal akuntansi berbasis akrual, hal itu ditandai dengan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dalam melakukan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional belum terlalu paham. Hal ini dapat dikarenakan karena saat ini masih digunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual yang belum menggunakan laporan operasional.

Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan seperti yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam beritasatu.com. Kementerian Keuangan (Kemkeu) akhirnya memulai implementasi sistem pelaporan keuangan berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, kementerian, dan lembaga.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, implementasi laporan keuangan berbasis akrual menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

"Akuntansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban

yang telah dibayarkan pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih wajar," ujar Mardiasmo dalam acara *Kick Off* Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua 2015 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Kemenkeu menilai, dengan sistem akrua, pengelolaan keuangan negara akan lebih tertib, taat perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Adapun persiapan pemerintah dalam penerapan sistem ini, yaitu penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pembangunan sistem aplikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan komitmen penyelenggara pemerintah.

Ia mencontohnya, seperti penerimaan pajak. Apabila menggunakan sistem akrua basis, ketika uang masuk di catat itu sudah menjadi bagian dari penerimaan. Namun, tantangannya yaitu ketika dicatat penerimaan belum tentu ada *cash*-nya. "Tapi nanti saat akrua basis pada saat dicatat di situlah jadi bagian dari penerimaan. Jadi ini akan menyelesaikan konteks piutang pajak dan segala macam. Yang jadi masalah adalah nanti pemikiran diimplementasi perubahan *mindset* kita karena pada saat dicatat penerimaan belum tentu ada *cash*-nya, tetapi kita sudah ada hak untuk mendapatkan *cash* tersebut," tutur dia.

Sementara itu, untuk belanja, Marwanto mencontohkan, apabila ada suatu kontrak yang harus dibayar hari ini maka dengan sistem akrua basis kewajiban pembayaran sudah muncul dan itu harus dicatat. "Dalam konteks belanja, sebagai contoh misalnya ada sebuah kontrak yang mesti dibayarkan pada hari ini, dalam sistem akrua basis maka kewajiban sudah muncul dan itu harus dicatat. Oleh

sebab itu, dampaknya akan memberikan transparansi terhadap publik dan *stakeholder* pemerintah sehingga hak dan kewajiban dicatat secara transparan dan tepat," ujar dia.

Penerapan sistem akrual basis telah dilakukan oleh negara-negara maju, seperti New Zealand, Australia, dan beberapa negara di Eropa. Sementara di ASEAN, Indonesia menjadi yang pertama. "Indonesia sebagai yang pertama di Asean menerapkan sistem akrual basis. Semoga bisa menimbulkan kepercayaan terutama dari publik khususnya para investor bahwa ke depan kita memiliki sebuah laporan yang betul-betul transparan menggambarkan hak dan kewajiban kita," ungkap Marwanto. (www.beritasatu.com) diakses pada tanggal 24 april 2015/pukul 13.00 wib.

Dari berbagai fenomena dan permasalahan di atas mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual belum sepenuhnya diterapkan saat ini karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum memahami betul tentang penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh, selain itu dalam pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual tidak lah mudah hal ini harus mempunyai pengalaman yang cukup dan berlatar belakang pendidikan akuntansi. Selain itu harus mendapat dukungan penuh dari Pemerintah pusat maupun daerah agar penerapan basis akrual ini dapat berjalan dengan baik dan optimal demi terciptanya tata kelola Pemerintahan (*good governance*) yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu tahun 2015 ini penerapan akuntansi akrual harus segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP No 71 maka di

butuhkannya unit satuan kerja yang berpengalaman serta yang memahami betul tentang penerapan akuntansi berbasis akrual dan khususnya berlatar belakang pendidikan akuntansi demi terciptanya tata kelola pemerintahan (*good governance*).

Selain itu Muhamad Indra Yudha Kusuma, 2013 mengatakan Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan juga amanat undang-undang agar pemerintah segera menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan sepengetahuan peneliti di Indonesia penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintahan masih sangat kurang. Di sisi lain hasil penelitian sebelumnya mengenai akuntansi akrual di negara-negara lain belum menyediakan bukti yang cukup meyakinkan mengenai keberhasilan para pengadopsi akuntansi akrual dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan akuntansi akrual ini diantaranya yaitu tidak lepas dari peran satuan kerja diantaranya seperti tingkat pendidikan staf keuangan/ latar belakang pendidikan dan pengalaman.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena di atas, maka penulis tertarik meneliti masalah **“PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN STAF KEUANGAN DAN PENGALAMAN TERHADAP TINGKAT PENERAPAN**

AKUNTANSI AKRUAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Pendidikan Staf Keuangan pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.
2. Bagaimana Pengalaman pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.
3. Bagaimana Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.
4. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.
5. Seberapa besar Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.
6. Seberapa besar Pengaruh Pengalaman terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.
7. Seberapa besar Pengaruh Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.

8. Seberapa besar Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan dan Pengalaman terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI dan dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI sesuai dengan SAP yang berlaku serta tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tingkat Pendidikan Staf Keuangan pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Pengalaman pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui Seberapa besar Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui Seberapa besar Pengaruh Pengalaman terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.

7. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan dan Pengalaman terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI dan dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu dalam bidang studi yang membahas mengenai tingkat penerapan akuntansi akruaI khususnya mengenai topik Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan dan Pengalaman terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dan semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis, penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Instansi/Perusahaan Pemerintah Daerah di Kota Bandung, penelitian ini dapat menambah informasi bagi kepala pemerintahan tentang pentingnya Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan Dan Pengalaman Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI.
3. Bagi Pihak lain, yaitu sebagai sumbangan yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan dan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta memberikan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) di Pemda Kota Bandung yang beralamatkan di Jl. Wastukencana No.2 Bandung. Adapun waktu penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada bulan April 2015 sampai dengan selesai.